

**RENCANA INDUK PENELITIAN
PROGRAM PASCASARJANA UNY
TAHUN 2017-2025**



**PROGRAM PASCASARJANA UNY
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Pada saat ini telah terjadi perubahan yang yang eksesif dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini di ssatu satu sisi akan membawa kemajuan, dan di sisi lain melahirkan berbagai permasalahan di masyarakat. Perguruan tinggi sebagai salah satu penyangga kemajuan bangsa harus terus berinovasi untuk mengembangkan ipteks guna menjawab berbagai tantangan dan permasalahan bangsa tersebut. .

Pascasarjana UNY, melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengebdian pada masyarakat berupaya untuk melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kegiatan penelitian memiliki peran strategis di dalam pengembangan dan penemuan ipteks. Oleh karena itu, perlu mendapat perhataan yang serius.

Buku Rencana Induk Penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan bagi para dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian khususnya penelitian untuk tesis dan disertasi. Tema-tema yang disajikan dalam buku ini dikembangkan atas dasar kecenderungan dan perubahan yang terjadi di msasyarakat saat ini. Semoga buku dapat memberi kemudahan bagi dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan topik-topik penelitian.

Direktur Pascasarjana UNY

Prof. Dr. Marsigit, MA
NIP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PENELITIAN	12
A. Dasar Hukum	12
B. Visi dan Misi Program Pascasarjana UNY.....	12
1. Visi.....	12
2. Misi.....	12
3. Tujuan.....	13
4. Indikator Kinerja	13
5. Base Line.....	14
C. Analisis SWOT Program pascasarjana UNY.....	14
1. Kekuatan	14
2. Kelemahan	14
3. Peluang.....	15
4. Ancaman	15
BAB III GARIS-GARIS BESAR RENCANA PENELITIAN	16
A. ARAH KEBIJAKAN.....	16
B. PRINSIP KEBIJAKAN PENELITIAN.....	26
C. PROGRAM RISET UNGGULAN.....	26
BAB IV STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA INDUK PENELITIAN	30
A. STRATEGI PENCAPAIAN	30
1. Tahap I pada tahun 2017-2021.....	30
2. Tahap II pada tahun 2021-2025.....	30
B. PENJAMINAN MUTU PENELITIAN	32
1. Standar Hasil Penelitian.....	32
2. Standar Isi Penelitian	34

3. Standar Proses Penelitian	35
4. Standar Penilaian Penelitian	36
5. Standar Peneliti.....	37
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	37
7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	39
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	39
C. SISTEM INFORMASI PENELITIAN	40
BAB V RAMBU-RAMBU UMUM PENYUSUNAN TEMA/TOPIK PENELITIAN PRODI DI PPs UNY.....	41
A. KEBIJAKAN PPS	41
B. PERAN PRODI.....	42
1. Pengembangan bidang keilmuan prodi.....	42
2. Menghasilkan Magister dan atau Doktor	42
C. PERMASALAHAN DAN SUBSTANSI	43
D. FORMAT PENGAJUAN JUDUL PENELITIAN TESIS DAN DISERTASI	45

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak terjadi perubahan kementerian pendidikan dan kebudayaan menjadi Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terjadi pula perubahan tata kelola universitas, yang lebih fokus pada kegiatan penelitian. Perubahan fokus ini kemudian mengubah pula haluan universitas untuk lebih menjadi pusat penelitian yang menjadi sumber energi bagi ke mana arah bangsa ini akan dibawa.

Jika mengacu pada cita-cita kemerdekaan, maka Indonesia yang kita bayangkan ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) Program Pascasarjana UNY ini, dimulai dari analisis secara objektif kondisi kekinian, kemudian memproyeksikannya ke depan. Kondisi objektif masyarakat Indonesia sekarang bersifat eklektif, yang berkarakter masyarakat agraris, masyarakat industri, dan kemudian masyarakat informasi secara bersamaan. Kondisi objektif ini bisa dijadikan pijakan untuk melihat masa depan Indonesia, atau setidaknya seperti yang disepakati, yaitu pada satu abad Indonesia merdeka, tepatnya tahun 2045.

Perhatian terhadap kondisi objektif kekinian dan bayangan serta harapan masyarakat Indonesia pada sepuluh tahun mendatang, dapat digunakan sebagai pertimbangan utama, dalam memperkirakan model pendidikan yang seperti apakah yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Indonesia di masa mendatang. Sebagaimana tercantum dalam visi Kemenristekdikti, yaitu “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”. Kemudian UNY juga memiliki visi yaitu, menjadi “Universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan pada tahun 2025”, seperti yang tercantum pada Statuta baru UNY. Dengan statuta baru, UNY memerlukan perubahan Rencana Induk Penelitian yang harus mengacu pula kepada visi baru

UNY. Oleh karena visi dan RIP merupakan cita-cita ideal yang dibayangkan dan akan dicapai di masa depan, maka perlu analisis komprehensif terhadap kondisi objektif masyarakat sekarang, dan seperti apa gambaran masyarakat yang dicita-citakan di masa depan.

Dunia politik, ekonomi, dan sosial-budaya terus mengalami perubahan mengikuti hukum-hukumnya yang tidak bisa dibendung. Perubahan itu sendiri merupakan sebuah keniscayaan. Dalam skala makro atau sistem dunia misalnya, moda produksi terus mengalami perubahan dari moda produksi feodalisme hingga kapitalisme, dan sekarang moda produksi era informasional. Perubahan ini berimplikasi pada perkembangan masyarakat dunia itu sendiri, meskipun sifat perubahan itu tidak secara serempak bergerak bersama-sama, tetapi terfragmentasi mengikuti karakter masing-masing bagian, entah berupa negara atau sebuah kawasan. Negara atau kawasan yang satu dengan lainnya secara empirik terbukti tidak bergerak bersama-sama, dan di sinilah sumber persoalan ketika menganalisis dinamika perubahan sistem dunia.

Segecap teoritis telah mempunyai perhatian terhadap dinamika sistem dunia tersebut, mulai dari tradisi ekonomi klasik, positivis-modernis, Marxian-neomaxian, hingga poststrukturalis dan postmodernis. Di luar itu, yang paling mutakhir adalah teoritis yang memiliki perhatian terhadap apa yang mereka sebut sebagai masyarakat informasional (*informational society*). Meskipun asumsi yang dibangun oleh pendukung terakhir itu sebagian masih mengikuti logika pendahulunya, tetapi dalam banyak hal mereka membangun teorinya mendasarkan diri pada perkembangan empirik yang telah berbeda, dan karena itu paradigma, perspektif, teori, dan konseptualisasinya juga berbeda.

Terdapat beberapa teoritis yang memiliki perhatian terhadap kecenderungan baru tersebut, baik yang berada dalam kubu paradigma positivistik-modernis maupun paradigma kritis. Untuk keperluan analisis RIP Pascasarjana UNY maka utamanya akan menggunakan paradigma kritis dengan perspektif teoretik yang diambil dari Manuel Castelle dan Scott Lash, selain itu akan menyinggung pula perspektif teoretik lain di luar kedua teoritis tersebut.

Sebagaimana teoritis sosial kontemporer, Castell berangkat dari pengamatan dan refleksinya bahwa dunia sosial menyodorkan kecenderungan baru. Ia meyakini bahwa telah muncul suatu masyarakat, kebudayaan, dan ekonomi baru bahkan bersifat revolusioner. Kemunculan kecenderungan baru itu bermula dari Amerika Serikat yang mulai tampak sejak dekade 1970-an, yaitu sejak munculnya teknologi informasional yang ditandai oleh dominasi televisi, komputer dan rumpunnya. Revolusi itu bergerak terus, dan sejak dekade 1980-an telah muncul fenomena apa yang oleh Castell disebut sebagai kapitalisme informasional, dan karena itu pada saat yang sama muncul masyarakat-masyarakat informasional.

Keduanya didasarkan pada 'informasionalisme': "suatu cara perkembangan ketika sumber utama produktivitas adalah kapasitas kualitatif untuk mengoptimalkan kombinasi itu dan menggunakan faktor-faktor produksi berdasarkan pengetahuan dan informasi" (Castell, 1998: 7).

Kapitalisme informasional yang berkarakter kapitalisme senantiasa menciptakan hubungan produksi eksploitatif, karena itu meminggirkan struktur sosial dan kebudayaan lainnya. Akan tetapi bentuk eksploitasinya berbeda dengan kapitalisme sebelumnya. Kapitalisme informasional melakukan berbagai eksploitasi, peminggiran, ancaman-ancamannya terhadap diri dan identitas lebih bersifat halus dan lembut. Menghadapi watak kapitalisme baru ini juga memunculkan perlawanan baru, yaitu gerakan-gerakan resistensi yang semangatnya sama dengan gerakan melawan kapitalisme lama, bukan sekumpulan kelas pekerja, tetapi sekumpulan pergerakan sosial beragam yang terutama didasarkan pada identitas, antara lain seperti ekologis dan feminis.

Di jantung analisis Castell ada apa yang ia sebut sebagai paradigma teknologi informasi dengan lima karakteristik dasar. Pertama, ada teknologi-teknologi yang bertindak berdasarkan informasi. Kedua, karena informasi adalah bagian dari seluruh kegiatan manusia, teknologi-teknologi itu mempunyai efek yang meresap. Ketiga, semua sistem yang menggunakan teknologi informasi didefinisikan oleh 'logika jaringan' yang memungkinkan mereka memengaruhi suatu varietas luas proses-proses dan organisasi-organisasi. Keempat, teknologi-teknologi baru sangat fleksibel, memungkinkan mereka beradaptasi dan berubah secara terus-menerus. Akhirnya, teknologi-teknologi spesifik yang diasosiasikan dengan informasi sedang bergabung menjadi suatu sistem yang sangat terintegrasi (dalam Ritzer, 2012: 969).

Menurut Castell sejak dekade 1980-an muncul apa yang ia sebut dengan ekonomi informasional global baru yang semakin menguntungkan. "Ia informasional karena produktivitas dan daya saing unit-unit atau agen-agen di dalam ekonomi ini (entah itu firma-firma, region-region, atau wilayah-wilayah) yang tergantung secara fundamental pada kapasitas mereka untuk menghasilkan, memproses, dan menerapkan secara efisien informasi berbasis pengetahuan (Castell, 1996: 66). Ia global karena ia mempunyai "kapasitas untuk bekerja sebagai suatu unit di dalam waktu nyata pada suatu skala planeter" (Castell, 1996: 92). Hal itu dimungkinkan untuk pertama kalinya oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang baru.

Meneruskan konsep ruang mengalir itu, kemudian Scott Lash menganalisis kemunculan masyarakat informasional itu secara lebih mendalam, detail, dan canggih. Sama seperti Castells, Lash setuju dengan kemunculan dunia baru, yaitu masyarakat informasional yang meskipun merupakan kelanjutan dari kapitalisme lama, tetapi memiliki berbagai karakter yang berbeda. Dengan pendekatan kritis,

Lash menganalisis kapitalisme informasional dengan berusaha memperluasnya terkait dengan filsafat, teori sosiologi, teori kebudayaan, baik klasik maupun kontemporer.

Masyarakat informasi sering dipahami dalam istilah produksi pengetahuan-intensif dan postindustrial di mana barang dan layanan diproduksi. Kunci untuk memahami ini adalah apa yang diproduksi dalam produksi informasi bukanlah barang-barang dan layanan kekayaan informasi, tetapi potongan informasi di luar kontrol. Pada produksi informasi hal yang penting adalah kemampuan. Sebagaimana diktum McLuhan medium adalah pesan dalam pengertian bahwa media adalah paradigma medium era informasi. Dahulu medium dominan adalah naratif, lirik puisi, wacana, dan lukisan, tetapi sekarang pesan itu adalah pesan atau 'komunikasi', dan media sekarang lebih seperti potongan-potongan. Media telah dimampatkan.

Lash mengingatkan bahwa informasi itu sendiri bersifat statis, komunikasilah yang membuat informasi menjadi dinamis, kuat, dan sumber energi. Mirip dengan pendapat Habermas, Lash yakin bahwa komunikasi itulah yang sekarang telah menjadi basis kehidupan sosial kontemporer. Oleh karena itu ia menjadikan komunikasi sebagai unit dasar analisisnya, dan bukan informasi. Lash kemudian melangkah lebih jauh dengan mengembangkan konsep di seputar isu perkembangan *Information Communication Technology* (ICT). Ketika ICT itu sendiri sering diposisikan sebagai entitas tersendiri yang berbeda dengan karakter-karakter masyarakat sebelumnya dengan titik berat pada produksi industrial, maka Lash menjelaskan bahwa dalam kategori era ICT, itu sendiri telah berkembang dengan karakter yang berbeda, dan oleh karenanya telah terjadi dua generasi dalam perkembangan ICT.

Generasi pertama perkembangan ICT secara fundamental adalah informasional, dengan sektor kuncinya adalah semikonduktor, software (sistem operasi dan aplikasi), dan komputer. Akan tetapi generasi kedua, ekonomi baru adalah komunikasional, karena itu sentralitasnya adalah internet dan sektor jaringan. Itulah sebabnya menurut Lash, Cisco Systems, yang membuat sarana jalan, sebagai 'pipa' komunikasi internet, yang menjadi kapitalisme pasar lebih tinggi daripada 'informational' Microsoft. Inilah yang dikenal sebagai pasangannya media baru (*new media*). Dalam pada itu konten dan komunikasi adalah terpenting kode, bukan berbasis pada sektor kode informasi. Jika ICT generasi pertama sangat erat kaitannya dengan Lembah Silokan California, maka ICT generasi kedua bukan perkara segar, bersih, dan semi desa Lembah Silokan, tetapi berurusan dengan kotor, urban 'silicon allys'. Silicon allys telah menjadi multimedia baru seperti CD-ROMs, permainan komputer (Allen, Scott, 2000). Mereka adalah multimedia konvergensi teknologi informasi dengan media.

Atas dasar asumsi itu Lash meyakinkan bahwa sekarang ini telah muncul gejala baru, muncul apa yang dikenal dengan ekonomi baru, yaitu ekonomi komunikasi itu sendiri. Karakter utamanya adalah minim akumulasi kapital dan informasi, tetapi lebih banyak aliran-aliran, dan aliran-aliran itu adalah komunikasi. Ia adalah komunikasi dalam arti luas. Implikasi teoretik atas fenomena baru itu adalah, bahwa teori aliran-aliran pada saat yang sama adalah teori-teori komunikasi.

Sikap Lash terhadap topik diskusi tersebut tetap menegaskan bahwa unit dasar analisisnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah pertanyaan soal kultur jarak jauh. Dalam masyarakat manufakture dulu hubungan-hubungan sosial diletakan pada suatu tempat dengan prinsip kedekatan, dan hubungan sosial pada saat yang sama sekaligus adalah ikatan sosial. Akan tetapi sekarang, dalam era informasional, hubungan sosial dipindahkan oleh komunikasi. Komunikasi adalah intens, dalam durasi pendek. Komunikasi memecah naratif menjadi pesan pendek/ringkak. Jika hubungan sosial lama menempatkan tempat dengan prinsip kedekatan, ikatan komunikasional adalah meletakan tempat pada jarak jauh.

Suatu komunikasi dan aliran diletakan pada panggung pusat, daripada aturan sosial dan lembaga/struktur. Sosiologi berargumen lebih progresif lagi, yaitu bahwa sekarang ini secara umum telah muncul fenomena *mediologi*. Oleh karena itu sekarang ini diberbagai universitas terkemuka di dunia telah mengenalkan dan mengajarkan tentang sosiologi media. Khususnya sekarang ini telah muncul apa yang dikenal sebagai logika mediologi. Mediologi akan mengharuskan bekerja dengan logika media dan komunikasi. Jika sosiologi Durkheimian mengenalkan konsep anomie, untuk menjelaskan perubahan dari feodalisme ke kapitalisme pabrik, sekarang mediologi, berbicara anomie postindustri aliran-aliran. Sosiologi setuju dengan re-teritorialisasi sosial, institusi modern, dan struktur masyarakat industri. Mediologi berbicara re-teritorialisasi masyarakat jaringan yang datang dari pengerasan aliran-aliran. Maka pada saat yang sama sekarang muncul fenomena ekonomi tanda dan ruang.

Dalam masyarakat kapitalisme lanjut, komunikasi adalah kunci, pergeseran dari logika struktur ke logika arus yang dimungkinkan oleh jangkauan hubungan yang dibawa oleh *outsourcing* pada umumnya. Dan *outsourcing* ini adalah re-teritorialisasi, misalnya perusahaan-perusahaan menjadi lebih bisa dikerjakan di rumah tangga. Bahkan kemudian ada perusahaan membolehkan kerja lembur per minggu di rumah, jadi tidak tergantung pada tempat atau ruang pabrik. Jadi sekarang ini di jaman tata informasi dan komunikasi global, semuanya serba *outsourcing* baik kerja di perusahaan firma, keluarga, negara, dan bahkan juga pada bidang seni. Karena itu bisa juga refleksivitas di *outsourced*, dan di eksternalisasi. Sekarang ini juga ada pergeseran dari akumulasi ke sirkulasi. Namun demikian juga

muncul apa yang disebut sebagai hegemoni sirkulasi di mana sirkulasi modal uang dipisahkan dari bagian akumulasi modal.

Semua perubahan karakter masyarakat tersebut mengalami perubahan moda-moda produksi, dari feodalisme, kapitalisme, kapitalisme lanjut, dan sekarang kapitalisme informasional dan bahkan komunikasional. Hal ini akan mengubah tata hubungan politik, ekonomi, dan kultural di tingkat global. Meskipun demikian, jika terkait dengan posisi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, maka situasinya masih belum berubah. Perubahan karakter masyarakat dan moda produksinya, tetap saja menempatkan negara berkembang dalam posisi subordinat di tengah dominasi negara-negara maju. Hubungan dominatif dan hegemonik tetap mapan, dengan posisi negara berkembang pada pihak yang menjadi obyek pasif yang terus dikendalikan untuk kepentingan ekonomi dan politik negara-negara penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masyarakat informasional dan komunikasional, juga mengenal hegemoni sirkulasi. Pada era seperti itu, tetap saja *outsourcing* adalah menentukan, dalam bentuknya yang baru sekarang ini pengendalian oleh *outsourcing* melalui penguasaan teknologi informasi. Jadi tidak mengherankan jika sekarang dalam konteks telekomunikasi, betapa sulitnya suatu negara seperti Indonesia akan menegakkan kedaulatan telekomunikasi. Aktor-aktor global dalam era informasional dan komunikasional, tetap saja adalah korporat-korporat global yang bergerak pada bisnis telekomunikasi, yaitu para vendor. Mereka inilah yang sekarang menjelma menjadi rezim baru dalam tata ekonomi dan politik global, yaitu rezim kaum vendor.

Begitulah, kecenderungan perubahan karakter masyarakat dunia di masa mendatang yang mengarus kuat ke arah masyarakat informasional dan komunikasional. Gambaran masa depan seperti itu sudah mulai terasa dan bahkan sudah merupakan fakta historis terjadi di Indonesia sekarang. Meskipun masih menunjukkan karakter sebagai masyarakat agraris dan masyarakat industri, tetapi tanda-tanda bahwa Indonesia mau tidak mau harus mengikuti perubahan ke arah masyarakat baru tersebut sudah terasa dan bahkan tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, negara dan bangsa Indonesia harus mempersiapkan bagaimana pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan untuk memasuki era baru tersebut, yaitu era masyarakat informasional dan komunikasional.

Perihal demografis juga menyodorkan permasalahan pada dunia pendidikan di Indonesia. Persoalan demografi meliputi penambahan jumlah penduduk, ketidakmerataan, meningkatnya lansia, dan yang krusial adalah kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Berbagai persoalan pendidikan dalam kaitannya dengan aspek demografis ini antara lain soal masih belum meratanya akses pendidikan antar kelompok dalam masyarakat. Capaian angka partisipasi sekolah

(APS) dari kelompok masyarakat miskin masih jauh tertinggal jika dibandingkan APS kelompok masyarakat kaya. Terdapat kesenjangan capaian partisipasi pendidikan menengah antarprovinsi dan antar kabupaten/kota. Dari 6.637 kecamatan, ada sekitar 231 kecamatan yang tidak memiliki SMP/MTs dan 935 kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK/MA.

Sementara itu dari sisi kualitas bidang pendidikan untuk beberapa aspek masih menjadi masalah, seperti misalnya masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4; proses sertifikasi guru tidak serta merta meningkatkan hasil belajar siswa; masih banyak satuan pendidikan yang belum memiliki laboratorium/ruang praktik siswa secara lengkap; rendahnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengembangkan metode pembelajaran; tiadanya pengembang dan pengelola sumber belajar di sekolah-sekolah formal; rendahnya pemahaman terhadap Kurikulum 2013; dan hubungan formalistik antara sekolah, komite sekolah, dan warga masyarakat itu sendiri.

Persoalan lain adalah kesenjangan partisipasi pendidikan yang meskipun disparitas antar daerah maupun antar kelompok sosial semakin kecil, tetapi secara kualitatif akses untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas disparitasnya masih lebar. Masih perlu upaya besar untuk memberikan garansi kepada usia sekolah 7-15 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Terdapat kecenderungan semakin jauh dari pusat layanan pendidikan semakin buruk, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa mereka yang masuk dalam kategori warga miskin akan mendapatkan layanan pendidikan semakin buruk, karena posisi mereka ada di wilayah pinggiran baik secara teritori maupun sosial.

Sementara itu jumlah penduduk miskin juga masih belum beranjak dari anka-angka memprihatinkan, yaitu masih di kisaran 18 persen dari jumlah penduduk Indonesia, yang berarti masih lebih dari 30 juta warga miskin. Itu pun hanya dipatok dengan kriteria pemerintah sendiri, yaitu pengeluaran Rp 7 ribu per hari untuk nasional dan Rp 10 ribu untuk warga Jakarta. Apabila menggunakan kriteria PBB yang merujuk Bank Dunia, yaitu pengeluaran di bawah \$ 1,25 AS per hari, maka jumlah warga miskin di Indonesia jauh di atas 18 persen. Bahkan belakng Bank Dunia menganjurkan bahwa angka ideal garis batas di bawah kemiskinan adalah pengeluaran \$2 AS per hari, sehingga jika kriteria baru ini yang digunakan maka jumlah warga miskin Indonesia akan lebih dari 59 persen.

Semua itu merupakan tiga komponen utama dalam pemeringkatan IPM. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) untuk 2015 adalah 0.689. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama

bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut.

Namun demikian IPM Indonesia menurun tajam ke 0,563 (turun 18,2 persen) bila kesenjangan diperhitungkan. Kesenjangan pendidikan dan harapan hidup saat lahir di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur dan Pasifik, namun Indonesia lebih baik dalam hal kesenjangan pendapatan dan gender dibandingkan dengan rata-rata di kawasan ini. Kesetaraan gender adalah pendorong utama pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2014, data yang terpilah menurut jenis kelamin diperkenalkan ke dalam IPM, yang memungkinkan UNDP untuk menghitung dan membandingkan IPM untuk laki-laki dan IPM untuk perempuan. Namun sayangnya di sebagian besar negara di dunia, laki-laki dan perempuan tidak menikmati tingkat pembangunan manusia yang sama. Di Indonesia, Indeks untuk laki-laki adalah 0,712. Sedangkan untuk perempuan Indonesia hanya mencapai 0,66.

Sementara itu, upaya mencerdaskan dunia, maka ditetapkan sebuah tujuan yang populer dengan Millenium Development Goals (MDGs), terutama di belahan dunia selatan yang kebanyakan penduduknya masih tertinggal dalam berbagai hal. MDGs atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, yang dideklarasikan dalam Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

- Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
- Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
- Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
- Menurunkan Angka Kematian Anak,
- Meningkatkan Kesehatan Ibu,
- Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
- Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
- Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Indonesia, yang juga menjadi salah satu anggota, telah berkomitmen untuk menetapkan target pendidikan dasar sebagai sebuah keniscayaan. Sejak era Orde Baru, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 6 tahun, dan

kemudian wajib belajar 9 tahun. Melalui program pemerataan pendidikan, pemerintah waktu itu telah meluncurkan SD Inpres, sehingga fasilitas pendidikan dasar menjangkau hingga ke pelosok tanah air. Program pemerataan pendidikan melalui SD Inpres ini cukup berhasil secara signifikan. Kemudian pemerintah meningkatkan target pendidikan dasar dengan program wajib belajar 9 tahun, dan bahkan sudah ada rencana wajib belajar 12 tahun, yang berarti setara dengan sekolah menengah lanjutan atas dan sederajat.

Pencapaian target kuantitatif hingga kini sudah cukup menggembirakan. Pada saat ini 94,7% penduduk Indonesia berhasil mengenyam sekolah dasar, dan angka ini terus mengalami pertumbuhan positif. Namun angka partisipasi di tingkat SMP hanya bergerak perlahan dari 41,9% pada tahun 1990, saat ini hanya berada di posisi 66,5% dari target 100% seluruh penduduk mengenyam pendidikan hingga SMP pada tahun 2015. Tujuan MDGs ke 2, yakni ketidaksetaraan akses pendidikan dan latihan memiliki 3 indikator, yaitu: (1) partisipasi di tingkat SD dan SMP; (2) proporsi murid yang bersekolah hingga kelas 5 dan tamat SD; (3) melek huruf usia 15-24 tahun. Secara umum gambaran angka partisipasi murni (APM) di tingkat SD belum sungguh-sungguh mengalami progress yang terus positif, melainkan mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Angka APM SMP mengalami peningkatan dengan trend fluktuatif. Upaya keras masih dibutuhkan untuk mencapai target 100% seluruh penduduk Indonesia bersekolah hingga jenjang SMP. Terlebih terkait partisipasi anak perempuan yang rasio partisipasinya lebih kecil dari anak laki-laki. Kondisi ini menunjukkan profil pendidikan di Indonesia, dimana makin tinggi jenjang pendidikan, makin rendah angka partisipasi perempuan. Akan tetapi problem mendasarnya adalah bagaimana target kuantitatif tersebut mampu bergeser ke target kualitatif. Harus diakui bahwa secara kualitatif mutu pendidikan di Indonesia kurang merata, dan sepertinya makin ke pinggiran makin rendah mutunya. Jadi berbagai lembaga pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK yang berkualitas lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan jauh lebih rendah kualitasnya.

Oleh karena itu lembaga legislatif harus mendorong kebijakan yang menggunakan paradigma pembangunan yang dimulai dari pinggir. Sebuah paradigma yang menjadikan daerah pinggiran sebagai awal dari perubahan, dan kemudian bergerak ke pusat. Hortstmann dan Wadley (2006) dalam kata pengantar buku *Centering the Margin: Agency and Narrative in Southeast Asian Borderlands* menjelaskan bahwa dinamika sosial yang terjadi di daerah pinggiran justru akan semakin menentukan kelangsungan negara-bangsa di masa depan. Dalam prinsip *centering the margin*, menjadikan daerah pinggiran sebagai titik awal perubahan bergerak secara dinamis ke arah pusat, sehingga titik kekuatan sebuah negara ada dalam bingkainya yang berwujud kuatnya pertahanan di daerah perbatasan baik

secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kebijakan seperti itu maka masyarakat nelayan yang terpinggirkan dan sektor kelautan akan menjadi pusat perhatian dalam dinamika pembangunan nasional.

Pengubahan paradigma tidak mudah, karena mengalihkan lokus perhatian di daerah perbatasan bergerak ke pusat, pada prinsipnya mengubah paradigma negara agraris menjadi negara maritim. Selama ini paradigma negara agraris lebih dominan berpengaruh pada para pengambil keputusan, dengan orientasi memperkuat di pusat. Sementara itu paradigma negara maritim yang lebih cenderung berorientasi membangun kekuatan dari pinggir, kurang begitu populer.

Perkembangan politik setelah kemerdekaan, terutama dengan menguatnya peran Angkatan Darat sebagai sebuah kekuatan politik, semakin menegaskan posisi Indonesia yang berorientasi ke darat dari pada ke laut. Dalam masa pemerintahan Soeharto, sentralisasi politik maupun ekonomi mengalami puncaknya dan menjadikan Jawa secara tuntas sebagai pusat Indonesia. Dalam perkembangan sejarah nusantara semacam itulah, konstruksi Indonesia sebagai *archipelagic state* atau negara yang semestinya berbasis maritim telah terkonstruksi semakin dalam menjadi negara “darat” yang berpusat di Jawa. Konstruksi negara “darat” yang mengagungkan sentralisme politik dan ekonomi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kawasan perbatasan yang dengan demikian diperlakukan sekadar sebagai kawasan pinggiran, marjinal, *excluded* dan terbiarkan (Riwanto Tirtosudarmo, 2010, *Mencari Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.).

Oleh karena itu para pengambil kebijakan harus memperhatikan prinsip *centering the margin* jika menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar kuat. Berbagai program pembangunan pelayanan publik juga harus lebih memprioritaskan yang di perbatasan. Atau paling tidak menjadikan daerah perbatasan sebagai titik berat pembangunan nasional dengan mengutamakan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Dalam pelayanan pendidikan, sudah saatnya membangun fasilitas pendidikan seperti lembaga pendidikan politeknik yang sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat perbatasan.

Meskipun demikian, pada tataran empiris perkembangan proses pendidikan dalam masyarakat di Indonesia tidak bergerak secara serempak menjadi masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan. Fenomena kesenjangan sosial ekonomi yang diikuti oleh kesenjangan digital dan kesenjangan budaya, adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi pada sisi lain, kehadiran era baru yang mendorong masyarakat semakin mengglobal juga memaksa negara-negara berkembang termasuk Indonesia harus menjadi bagiannya. Karena itu konsekuensi logisnya Indonesia juga harus menghadapi isu-isu yang bersifat global. Sebagaimana disepakati oleh dunia internasional, dunia sekarang juga dihadapkan pada situasi

krisis luar biasa, ketika dunia dihadapkan pada isu dan permasalahan fundamental seperti pemanasan global dan konsekuensi-konsekuensi politiknya untuk perang-perang memperebutkan air; menyebarluasnya berbagai penyakit infeksi seperti flu burung, ebola, yang bisa berdampak pada kerusakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial; konflik-konflik di Irak, Afghanistan, Suriah, munculnya ISIS dan NIIIS, dan Timur Tengah pada umumnya, genosida, kelaparan, kekeringan di berbagai negara Afrika; krisis di pasar-pasar finansial global, dan meningkatnya ketegangan antarkekuatan-kekuatan besar memperebutkan sumber-sumber dasar; munculnya dominasi RRC di berbagai bidang industri dan perdagangan internasional. Berbagai persoalan mendasar di tingkat global tersebut akan berimbas ke Indonesia. Sementara di Indonesia berbagai persoalan fundamental seperti kemiskinan, pengangguran lulusan perguruan tinggi yang terus meningkat, kesenjangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur; bencana alam, dan berbagai penyakit infeksi maupun degeneratif yang terus meningkat; dan di bidang mentalitas bangsa juga masih banyak menyodorkan masalah mendasar seperti rendahnya etos kerja dan etos belajar, budaya konsumtif yang makin meraja lela, korupsi yang terus marak, anarkisme massa, narkoba, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Pendidikan nasional menjadi sangat strategis dalam mencari solusi yang tepat terhadap berbagai persoalan mendasar itu. Pendidikan tidak akan mengatasi semua hal tersebut, akan tetapi paling tidak harus menempatkan diri dan ambil bagian dalam upaya mencari solusi terhadap berbagai masalah internasional dan nasional tersebut. Sementara itu dalam kaitannya dengan kehadiran masyarakat informasi yang tidak bisa dihindarkan, maka peran pendidikan juga tidak kalah strategis, yaitu bagaimana mendorong masyarakat ke arah masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan pada satu sisi, tetapi pada sisi lain tetap mengakomodir perspektif kritis dengan memperhatikan warga masyarakat yang masih terpinggirkan; dan kemudian mendorongnya menuju perubahan sosial yang emansipatoris dan partisipatoris. Dalam pada itu maka tugas utama pendidikan nasional ke depan adalah memfasilitasi proses pendidikan bagi warga negara yang di samping mumpuni dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sekaligus memiliki kepekaan tinggi terhadap masalah kemanusiaan. Meminjam terminologi Ki Hadjar Dewantara, proses pendidikan nasional harus melahirkan pribadi-pribadi bangsa yang tidak saja pintar, tetapi juga arif-bijaksana.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

A. Dasar Hukum

Pengembangan Penelitian Program Pascasarjana UNY berlandaskan pada:

1. Statuta UNY 2017 (SK Menristekdikti Nomor 35 tahun 2017)
2. Renstra UNY 2015 – 2019 revisi Januari 2016
3. Rencana Induk Penelitian UNY 2016 - 2020
4. Rencana Induk PPM LPPM UNY 2014 – 2018
5. Rencana Strategis PPM UNY 2016 – 2020
6. RPJP UNY Menuju WCU 2015 - 2025
7. Rencana Induk Riset Nasional 2015 – 2045 Kemenristek dikti
8. SN Dikti No. 44 Tahun 2015

B. Visi dan Misi Program Pascasarjana UNY

1. Visi

Pada tahun 2025 menjadi Program Pascasarjana Kependidikan yang unggul, kreatif dan inovatif dalam Pendidikan dan Penelitian di Asia Tenggara, berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendikiaan

2. Misi

Untuk mencapai visi, ditetapkan misi pengelolaan Program Pascasarjana UNY, sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang magister dan doktor dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan untuk mendukung bidang pendidikan yang unggul sesuai dengan KKNi, SN-Dikti, serta tuntutan masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasional.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian pendidikan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

- dan olahraga yang memberdayakan individu dan masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah regional;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam;
 - d. Menyelenggarakan tata kelola Program Pascasarjana yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
 - e. Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan magister dan doktor yang profesional dan berbudaya, mampu mengamalkan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian dan pengabdian dengan perspektif multidisiplin;
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah nasional dan regional;
- c. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi oleh dosen dan mahasiswa sesuai program studi masing-masing;
- d. Menghasilkan tatakelola institusi Program Pascasarjana yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- e. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif untuk pengembangan intelektualitas dan profesionalisme;
- f. Membangun kerjasama nasional dan internasional terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan kemanusiaan;

4. Indikator Kinerja (Tabel Kualitas dan Kuantitas pertahun)

- a. Jumlah dan kualitas magister dan doktor
- b. Jumlah Penelitian Dasar
- c. Jumlah Penelitian Terapan
- d. Jumlah Penelitian Pengembangan
- e. Jumlah publikasi internasional bereputasi minimal 200 setiap tahun
- f. Jumlah publikasi nasional terakreditasi
- g. Jumlah publikasi internasional terindeks
- h. Jumlah publikasi prosiding terindeks
- i. Jumlah buku ajar yang dihasilkan minimal 1 buku setiap prodi setiap tahun;

- j. Jumlah HaKI

5. Base Line

- a. Jumlah dan Skim Penelitian (....)
- b. Jumlah dan Skim PPM (....)
- c. Publikasi Ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus (.....), Thompson (....)
- d. Publikasi Seminar Internasional (...)
- e. Publikasi Artikel Jurnal Ilmiah Nasional (...)
- f. MoU dengan PT Luar Negeri (....)
- g. Jumlah Buku yang dihasilkan hingga tahun 2017 (....)
- h. Jumlah SDM Guru Besar hingga 2017 (rerata program studi....)
- i. Join research dengan PT LN dan Industri (.....)
- j. Jumlah lulusan doktoran hingga 2017 (....)
- k. Jumlah lulusan magister hingga 2017 (....)
- l. Jumlah jurnal bereputasi yang dikelola PPs UNY 2017 (....)

C. Analisis SWOT Program pascasarjana UNY

1. Kekuatan

- a. Ranking UNY secara nasional pada rangking 10 nasional yang menunjukkan daya saing semakin tinggi.
- b. SDM PPs-UNY relatif memadai
- c. Animo pendaftar kecenderungan naik dan sebaran meluas
- d. Daya serap lulusan semakin baik
- e. Jumlah jurnal internasional yang cenderung naik.
- f. Sarana dan prasarana yang memadai

2. Kelemahan

- a. Networking penelitian masih terbatas
- b. Jenis penelitian masih banyak terapan
- c. Dana masih terbatas
- d. Belum ada jurnal internasional terindeks scopus
- e. Ruang lingkup permasalahan penelitian masih terbatas

3. Peluang

- a. Ada kebijakan baru dari pimpinan yang mendukung bidang penelitian dan publikasi
- b. Tawaran dari Institusi luar UNY seperti pemda,
- c. Iklim akademik yang sejalan dengan peningkatan penelitian yang lebih berkualitas.
- d. Dukungan pimpinan terhadap kemajuan UNY kuat.

4. Ancaman

- a. Tuntutan branding pascasarjana dan prodi
- b. Tuntutan Publikasi pada jurnal Internasional bereputasi
- c. Perkembangan program pasca sarjana di perguruan tinggi di Yogyakarta.
- d. Perkembangan Ipteks

BAB III

GARIS-GARIS BESAR RENCANA PENELITIAN

A. ARAH KEBIJAKAN

Rencana Induk Penelitian Program Pascasarjana UNY Tahun 2017-2025 (RIP PPS UNY 2017-2025), disusun untuk menyelaraskan ke-butuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. RIP PPs UNY menjadi penting karena perkembangan keilmuan membutuhkan perencanaan sektoral untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang terpadu dan terintegrasi, khususnya antar bidang ilmu yang diwakili oleh program studi yang ada di PPs UNY, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya.

RIP PPs UNY 2017-2025 dirancang dengan pendekatan linieritas bidang keilmuan dan juga mengembangkan pendekatan holistik, lintas bidang keilmuan, lintas ranah dan berdasarkan topik riset. Hal ini dilakukan karena tidak semata-mata hanya untuk mengakomodasi penelitian dosen dan mahasiswa di PPs UNY, tetapi lebih dari itu yaitu penelitian tersebut dapat memberikan sumbangan kepada permasalahan bangsa dan bahkan permasalahan pendidikan dunia.

RIP PPs UNY 2017-2025 ini merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian di PPs UNY dalam jangka waktu 8 tahun. RIP PPs UNY disusun sebagai dasar bagi pelaksanaan penelitian delapan tahun ke depan. Pada dasarnya esensi dari penyusunan RIP PPs UNY adalah pengembangan *roadmap* penelitian. Penyusunan *roadmap* penelitian diharapkan menjadi basis peningkatan mutu perguruan tinggi dan atmosfer akademik yang kondusif. Disamping itu, produk penelitian diharapkan menjadi acuan pengembangan praktek-praktek pendidikan maupun non kependidikan bagi masyarakat, dunia usaha/industri, dan *stakeholders* lainnya dalam lingkup lokal, nasional, regional, maupun internasional. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut sudah seharusnya PPs UNY memiliki suatu panduan berupa *roadmap* penelitian yang dapat mempercepat upaya peningkatan kualitas penelitian dan pencapaian Visi UNY 2025 untuk menjadi universitas kependidikan kelas dunia (*world class university*) yang unggul berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan.

Perumusan kerangka kebijakan RIP PPs UNY 2017-2025 disusun dalam kerangka perwujudan visi, misi, dan tujuan UNY dan PPs UNY dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan terkait seperti Prioritas Riset Nasional 2015-2019 yang telah diselaraskan dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045. Prioritas Riset Nasional ini disusun dengan mempertimbangkan

berbagai dokumen sistem perencanaan nasional, khususnya RPJPN 2005-2025, PUNAS Riset di dalamnya, serta RPJMN 2015-2019.

Sesuai dengan RPJMN dan dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh bidang fokus dari Prioritas Riset Nasional 2015-2019, masing-masing dengan 3-5 topik unggulan. Sepuluh bidang fokus tersebut dikembangkan oleh Ditjen Penguatan Risbang menjadi 10 bidang fokus strategis untuk diteliti dengan mengakomodasi semua cabang keilmuan di perguruan tinggi, sebagai berikut:

1. Kemandirian Pangan;
2. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan;
3. Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat;
4. Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan;
7. Material Maju;
8. Kemaritiman;
9. Teknologi dan Manajemen Penanggulangan Kebencanaan; dan
10. Sosial Humaniora - Seni Budaya- Pendidikan.

Paparan Sepuluh bidang fokus strategis oleh Ditjen Penguatan Risbang untuk diteliti ini bukan berarti bidang pendidikan yang ke 10 kemudian tidak menyentuh sembilan bidang lainnya, tetapi penyiapan SDM untuk sepuluh bidang tersebut pada prinsipnya juga melalui proses pendidikan.

Visi Indonesia yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Jabaran dari visi tersebut adalah:

1. Mandiri: Mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri
2. Maju: SDM Indonesia berkualitas dan makmur disertai sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantab
3. Adil: Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah
4. Makmur: Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Sasaran Visi Indonesia 2025 merupakan landasan bagi terwujudnya Master Plan 2025. Sasaran Visi Indonesia 2025 tersebut antara lain:

1. Meningkatkan jumlah HaKI
2. Meningkatkan infrastruktur Sain dan Teknologi berstandar internasional.
3. Mencapai swasembada pangan, obat-obatan, energi dan air bersih berkesinambungan
4. Meningkatkan ekspor produk industri kreatif
5. Meningkatkan jumlah produk-produk unggulan dan nilai tambah industri dari berbagai daerah
6. Mencapai swasembada produk dan sistem industri pertahanan, transportasi dan ICT.
7. Mencapai pertumbuhan ekonomi

Kemenristekdikti dalam Renstra Tahun 2015-2019 menetapkan visi: “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”

Lebih lanjut dirumuskan sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas Iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang mendukung:
 - a. daya saing sektor produksi barang dan jasa;
 - b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
 - c. penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
2. Meningkatnya ketersediaan faktor input bagi penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan, dan pembiayaannya.
3. Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.

Sebagai sebuah universitas yang bertransformasi dari Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, maka fokus bidang keilmuan di PPs UNY adalah pendidikan dalam berbagai jalur dan jenjang baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Disamping itu pengembangan bidang keilmuan dasar, terapan, dan pengembangan juga mendapatkan prioritas sebagai bagian dari RIP PPs UNY 2017-2025 ini. Bidang ilmu kependidikan merupakan bidang garapan utama (*main mandate*) UNY sebagai Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK). Bidang ilmu non kependidikan merupakan bidang ilmu yang ditujukan untuk memperkuat pengembangan bidang kependidikan. Pengembangan bidang ilmu non kependidikan merupakan perluasan dari mandat utama UNY (*wider mandate*) selaras dengan perubahan IKIP Yogyakarta menjadi UNY.

Penelitian dalam bidang kependidikan bila dilihat dari kelembagaannya diarahkan kepada upaya membangun pendidikan jalur formal, informal, maupun nonformal. Paradigma penyelenggaraan pendidikan meliputi: pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, dan pendidikan membangun kebudayaan. Namun ini semuanya perlu dikaitkan dengan empat prinsip pembangunan SDM nasional, yaitu mandiri, maju, adil, dan makmur.

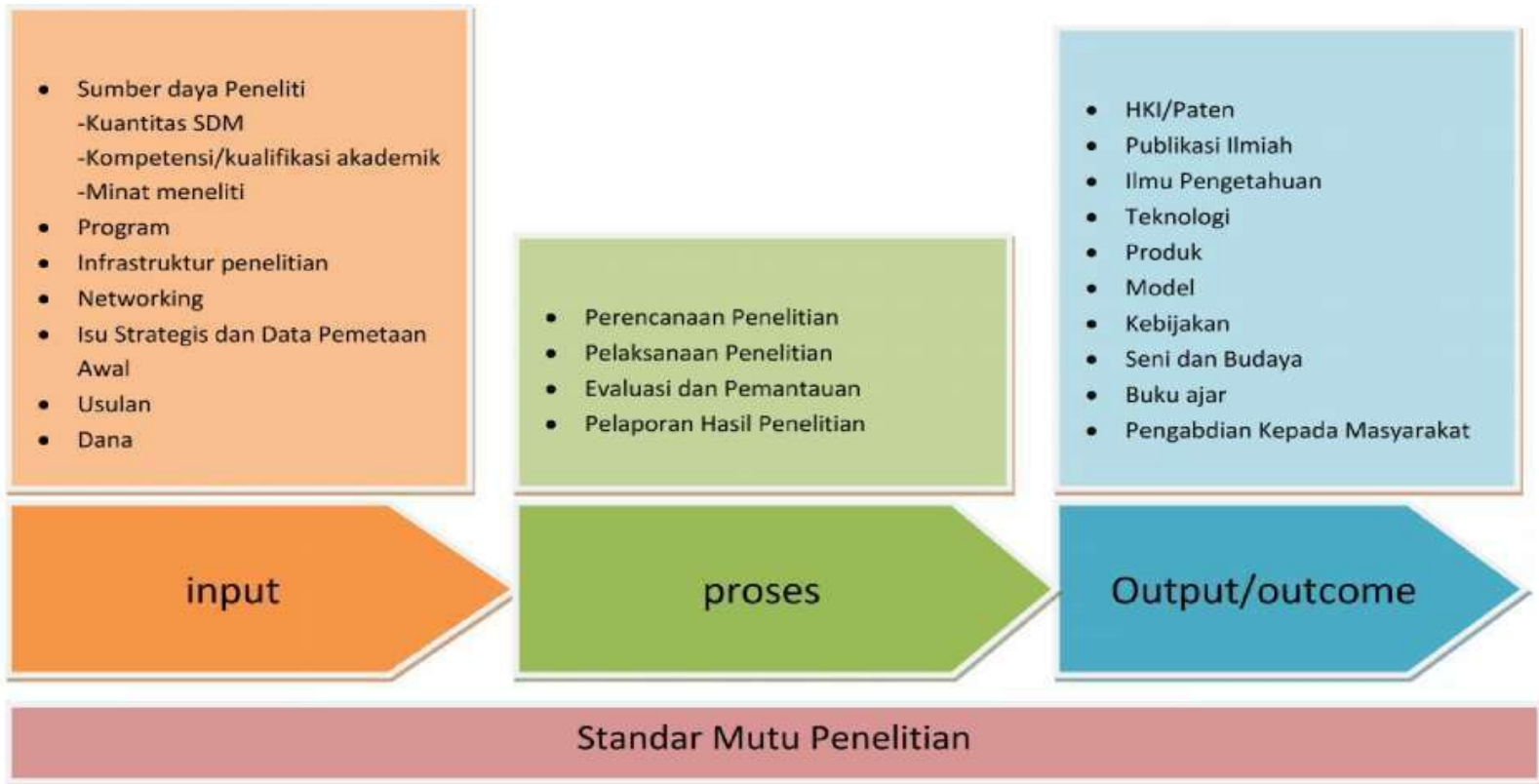
Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan PPS UNY ke depan maka disusunlah Rencana Induk Penelitian PPs UNY. Kebijakan penelitian diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian multi dan interdisipliner dalam bidang kependidikan dan non kependidikan dalam kerangka mewujudkan universitas kependidikan tingkat dunia yang berkontribusi bagi pemecahan permasalahan daerah, nasional, regional dan internasional. Secara rinci kebijakan tersebut difokuskan kepada upaya:

1. Pengembangan Penelitian Pendidikan
 - a. Pengembangan Pendidikan Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal
 - b. Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Riset
 - c. Pengembangan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d. Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan dan Vokasi
 - e. Penguatan Kelembagaan Pendidikan
2. Pengembangan penelitian non kependidikan selaras dengan kerangka kebijakan strategis pembangunan iptek dalam mendukung visi UNY
 - a. Pengembangan Teknologi dan Produk Ramah Lingkungan Berbasis Lokal dan Berdaya Saing Tinggi
 - b. Peningkatan Kualitas dan Kapabilitas SDM untuk Pembangunan Sosial, Ekonomi, Bahasa, dan Seni
 - c. Optimalisasi Potensi Olahraga yang Berkarakter Berbasis Iptek

Kebijakan PPs UNY sudah dituangkan pada visi dan misinya, yaitu menjadi program PPs Kependidikan yang unggul dalam pendidikan dan penelitian di Asia Tenggara pada tahun 2025. Oleh karena itu untuk mencapai keunggulan tersebut perlu dibuat ancangan program yang jelas arah dan target-target pencapaiannya setiap periode tertentu. Karena itu diperlukan peta strategi pengembangan penelitian di PPs UNY sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.

Pengembangan proses penelitian diarahkan pada kualitas dan prosedur perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian yang intensif dan dapat dipertanggung jawabkan, evaluasi dan pemantauan penelitian untuk menjamin kualitas penelitian serta pelaporan yang tepat waktu dengan validitas yang dipercaya. Output penelitian ditetapkan sesuai dengan tingkat luaran dan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dampak (*outcome*) yang baik pada bidang keilmuan, pengembangan insitusi maupun manfaatnya bagi masyarakat luas.

Ada beberapa jenis penelitian yang dapat dikembangkan dalam rangka mendukung pencapaian RIP PPs. Best (1981) membagi jenis penelitian menurut maksud dan tujuan, yaitu *fundamental research*, *applied research*, *action research*, dan *evaluation research*. Dalam RIP PPS UNY, ini sesuai dengan kebijakan penelitian di tingkat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dibagi menjadi 3 macam penelitian menurut tujuannya, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Hal ini yang sudah secara jelas diturunkan dalam statuta UNY.



Gambar 1. Peta Strategi Pengembangan Penelitian Program Pasca Sarjana UNY

Penelitian dasar atau disebut penelitian murni (*pure research*) atau *basic research* berorientasi pada dihasilkannya teori, metode, atau kebijakan baru pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, pendidikan, sosial humaniora, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Kegiatan penelitian dasar diarahkan untuk mendorong peneliti melakukan penelitian dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak secara ekonomi dalam jangka pendek. Penelitian dasar atau murni bersifat laboratory yang lebih bersifat psikologis bukan edukatif, tetapi bisa terkait pendidikan. Menurut Sukmadinata (2005) penelitian dasar merupakan penelitian untuk menambah pengetahuan dengan menemukan prinsip-prinsip dasar, hukum ilmiah, serta untuk meningkatkan pencarian dan metodolgi ilmiah. Generalasi hasil penelitian bersifat umum dan bersifat abstrak tetapi berlaku secara universal. Misalnya penelitian dalam pendidikan, yaitu penelitian yang bersifat filsafati dan psikologi, serta tergantung pada karakteristik bidang keilmuan yang melekat pada *core business* dari suatu program studi. LIPI memberikan definisi penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis. Bagi PPs hal ini penting karena misi PPs salah satunya adalah pengembangan ilmu. Dengan kata lain melalui penelitian dasar maka suatu program studi atau PPs akan memiliki peluang pada pengembangkan bidang keilmuannya.

Penelitian terapan (*applied research*), dilatarbelakangi belum termanfaatkannya secara optimal dan terpadu potensi dan ketersediaan sumber daya manusia di perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lokal dan nasional. Penelitian terapan adalah penelitian untuk memecahkan masalah mutakhir yang dihadapi seseorang pemegang keputusan. Penelitian terapan juga merupakan penelitian untuk menerapkan hasil temuan guna memecahkan permasalahan spesifik yang sedang dihadapi oleh komunitas tertentu. *Applied research* bertujuan meningkatkan kualitas produk dan proses yaitu *testing theoretical concepts in actual problem situations*. *Most educational research is applied research* (Best, 1981, p. 22). Kurangnya program penelitian di perguruan tinggi yang terkait dengan sektor riil dan berorientasi pada kebutuhan pasar (*market driven*), mengakibatkan kurang berkembangnya sektor produksi strategis karena lemahnya penguasaan teknologi dan rekayasa bidang terkait. Dalam bidang sosial, seni, dan budaya, diperlukan penelitian yang mengacu pada peningkatan pembangunan karakter bangsa, selain berkomplementasi dengan bidang teknis agar inovasi yang dihasilkan dapat diterapkan dengan baik dan harmonis dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini juga diarahkan untuk

mengantisipasi kebutuhan iptek-sosbud untuk jangka menengah dan panjang melalui penelitian unggulan. *Action research* adalah salah satu penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan langsung dengan menggunakan teori dan metode yang telah teruji. Action research tidak diartikan hanya classroom action research tetapi lebih luas lagi yaitu institutional action research atau penelitian pada program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Penelitian pengembangan berorientasi pada dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Penelitian pengembangan di PPs UNY sebaiknya mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP PPs UNY. Penelitian ini harus terarah dan bersifat *top-down* atau *bottom-up* dengan dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari perguruan tinggi serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari program ini ditujukan untuk mencapai penelitian unggulan perguruan tinggi yang pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah di ujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian Pengembangan diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa produk HaKI atau HKI yang siap didifusikan ke industri atau masyarakat, sehingga terjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/industri dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa

Tujuan dari penelitian pengembangan, diantaranya adalah:

- a. mendorong percepatan capaian rencana strategis penelitian perguruan tinggi menjadi pusat keunggulan untuk pengembangan model/produk/purwarupa hasil penelitian sampai mencapai Tingkat Kesiapan Teknologi 7 (TKT 7). untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi;
- b. menyinergikan penelitian di perguruan tinggi dengan kebijakan dan mewujudkan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran perguruan tinggi, sarana dan prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat;
- c. membangun jejaring kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra industri/investor sehingga mampu meningkatkan kapasitas penelitian institusi perguruan tinggi untuk menjawab tantangan kebutuhan iptek-sosbud oleh pengguna sektor riil.

Penelitian assessmen dan evaluasi. Penelitian asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan dari kegiatan pendidikan yang dilakukan. Pada penelitian evaluasi lebih luas dan lebih terfokus pada penggunaan hasil evaluasinya yang terkait dengan keefektifan, kegunaanya secara sosial dari suatu program. Temuan dipakai dasar untuk rekomendasi untuk langkah kebijakan lanjutan atau perbaikan.

B. PRINSIP KEBIJAKAN PENELITIAN

Kebijakan penelitian di pascasarjana mengikuti beberapa prinsip yang ada dalam KKN level 8 dan 9 yaitu penelitian multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin:

1. Pendekatan multi disiplin digunakan apabila penelitian memecahkan permasalahan besar menggunakan berbagai disiplin secara bersama-sama untuk berbagai substansi permasalahan yang ada. Hasil pemecahan bersifat komprehensif.
2. Pendekatan interdisiplin: digunakan apabila penelitian bertujuan memecahkan permasalahan dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari lebih dari satu disiplin.
3. Pendekatan transdisiplin digunakan apabila penelitian bertujuan: ~~upaya~~ mengembangkan suatu teori atau aksioma baru dengan membangun keterkaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin. Pada pendekatan ini ada **transformasi konsep** dari beberapa disiplin.

C. PROGRAM RISET UNGGULAN

Riset unggulan adalah riset yang mempunyai dampak yang luas dan memberikan sumbangan pada penyelesaian permasalahan bangsa Indonesia dan memiliki posisi strategis bila permasalahan ini dapat diselesaikan. Yang termasuk dalam program riset unggulan adalah pendidikan karakter, nasionalisme dan kebangsaan karakter kerja, karakter unggul, karakter kreatif, karakter mandiri dan merdeka, serta karakter inovatif? Topik riset yang lain dari program ini adalah pendidikan pada komunitas tertinggal, terpinggirkan, dan terjajah secara ekonomi, budaya, politik, serta Pendidikan Kebinekaan?

Sejatinya Program Pascasarjana memiliki peranan yang sangat strategis dalam akselerasi kualitas dan kuantitas penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta mengarahkan pendidikan yang berbasis pada kegiatan pembelajaran melalui kegiatan riset. Melalui kegiatan riset, para mahasiswa memiliki kesempatan menemukan masalah, mencari berbagai solusi secara ilmiah dan merumuskannya menjadi metode yang baku dan bisa direproduksi. Proses melihat masalah, berpikir, bertindak secara ilmiah dalam koridor etika ilmiah ini

merupakan ajang pembelajaran dan penciptaan SDM muda dengan literasi iptek yang tinggi di kemudian hari. Pola dan budaya ilmiah semacam inilah yang kelak menjadi modal penting untuk berkiprah dan berkompetisi secara global.

Untuk mendukung penguatan peran PPs UNY maka tema-tema strategis yang menjadi prioritas dalam penelitian dilingkungan PPs UNY, baik penelitian Tesis dan Desertasi Mahasiswa, maupun penelitian bidang keahlian yang dilakukan oleh Dosen. Tema-tema ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan fokus pengembangan keilmuan berdasarkan bidang keahlian yang ada. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan tema-tema lain yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilakukannya, seperti kebencanaan, kasus aktual sosial humaniora, dan lain-lain.

Tema-tema yang menjadi prioritas penelitian di PPs UNY, adalah:

1. Pendidikan Berkarakter dan berdaya saing

Tema ini mengacu pada pendidikan karakter konstruksi negara yang meliputi 18 karakter dalam kaitannya dengan upaya membentuk dan mengembangkan bangsa Indonesia berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global. Tema ini juga mencakup pendidikan karakter konstruksi warga negara Indonesia berdasarkan latar belakang sosio-kulturalnya.

2. Pendidikan Berkeadilan

Tema ini merupakan respons atas fenomena ketidakadilan pada berbagai level, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan isu ketidakadilan antara lain kemiskinan struktural, kesenjangan pembangunan Indonesia wilayah barat dan timur, gender, etnisitas, konflik identitas, dan kesenjangan digital. Tujuan utama mengangkat tema ini adalah pemberian kesempatan kepada semua warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang emansipatoris dan partisipatoris.

3. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan

Tema ini merupakan respons atas semakin menurunnya daya dukung lingkungan alam maupun sosial-budaya yang semakin fenomenal. Berbagai persoalan berkaitan dengan tema ini antara lain pemanasan global; dampak bioteknologi terhadap harapan-harapan manusia; hubungan antara sains, teknologi, dan masyarakat; penurunan kualitas lingkungan; krisis pangan dunia, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan; krisis energi; energi terbarukan;

dan lain-lain. Muara dari tema ini adalah persoalan bagaimana pendidikan yang menjamin kelestarian lingkungan hayati, fisik, sosial, dan budaya.

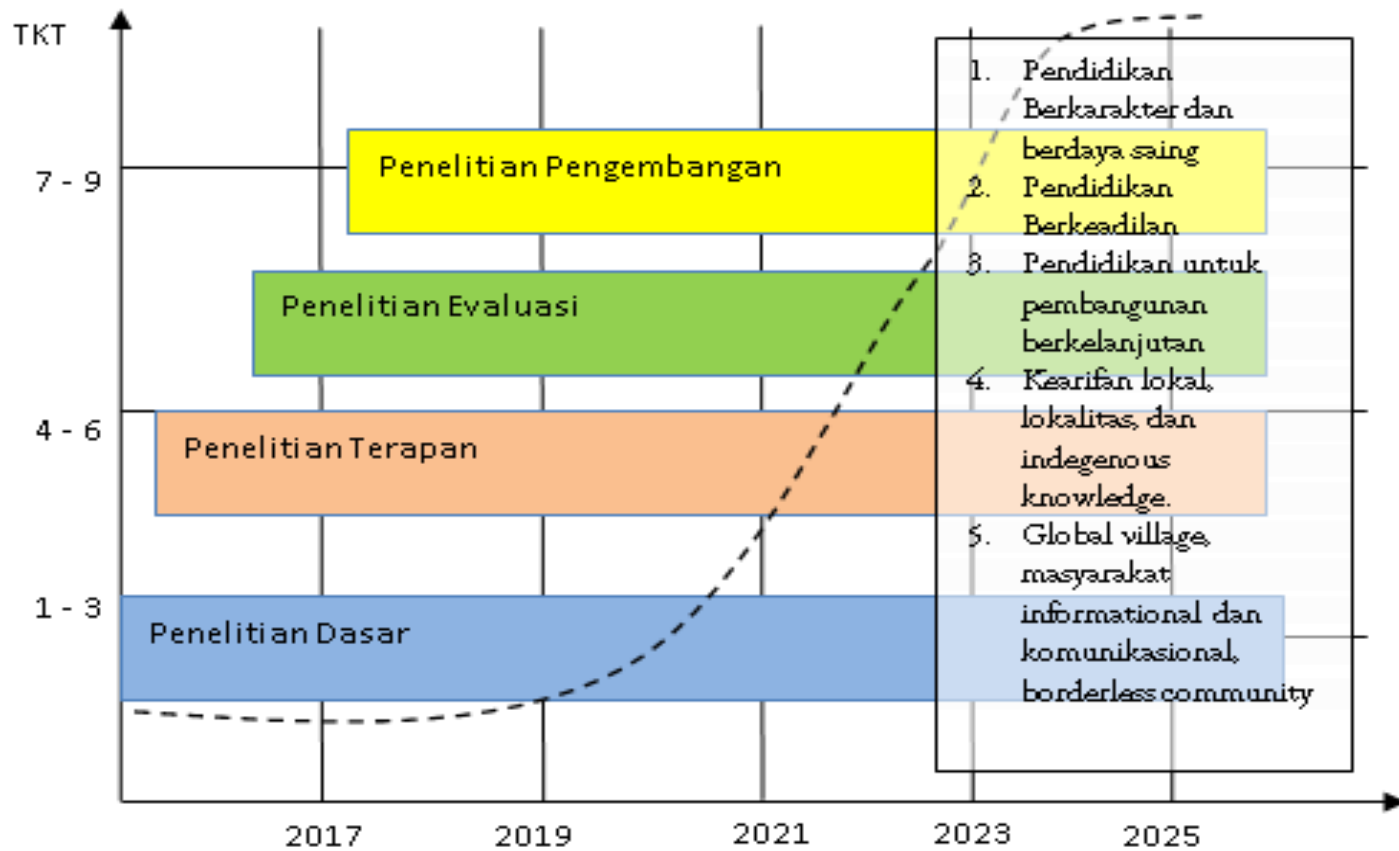
4. Kearifan lokal, lokalitas, dan indigenous knowledge.

Tema ini merupakan respons atas menguatnya kecenderungan universalisme yang merambah pada tataran teoretik maupun praktis dalam dunia sosial-pendidikan. Persoalan di seputar isu utama tema ini antara lain pendidikan berbasis pengetahuan lokal dan kearifan lokal; lokalitas yang proaktif menyambut hadirnya globalisasi yang menguniversalkan pengetahuan dan praktik gaya hidup; menggeliatnya agama/kepercayaan lokal; dan bangkitnya indigenous knowledge atas dominasi pengetahuan Barat.

5. Global village, masyarakat informational dan komunikasional, borderless community

Tema ini merupakan respons atas fenomena dinamika masyarakat dunia yang semakin mengecil baik secara politik, ekonomi, dan sosial-budaya berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Berbagai isu dan persoalan mendasar di seputar tema ini antara lain pendidikan terdigitalisasi, e-learning, e-library; demokrasi digital, cyber culture; masyarakat jaringan dan pendidikan; new-media dan pendidikan; offline society dan online society.

Untuk menggambarkan lebih jelas RIP PPs UNY berdasarkan Tingkat kesiapan teknologi (TKT), jenis penelitian dan tahun pencapaian, digambarkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Roadmap penelitian PPS UNY 2017 -2025

BAB IV

STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA INDUK PENELITIAN

A. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian Rencana Induk Penelitian Program Pascasarjana UNY 2017 – 2025 dibagi menjadi dua tahapan empat tahunan, yaitu Tahap Pertama tahun 2017-2021 dan Tahap Kedua tahun 2025. Strategi dan kebijakan bersumber dari arah kebijakan PPS UNY. Kebijakan dari PPS UNY bersumber dari Visi, Misi dan Sasaran Mutu serta kebijakan penelitian unggulan institusi. Dari pijakan arah kebijakan tersebut perlu dipadukan dengan analisis SWOT berkaitan dengan SDM, sarana dan prasarana PPS UNY. Dari kebijakan dan kondisi saat ini, perlu ada aktivitas pengembangan berupa pelatihan, klinik proposal, seminar dan diskusi ilmiah secara rutin setiap semester. Selain itu ada sistem pemberian penghargaan yang mampu memberikan motivasi dosen dalam melakukan penelitian.

Luaran dari kegiatan pengembangan tersebut dapat dilihat dari parameter sebagai berikut:

1. Tahap I pada tahun 2017-2021

- a. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan dosen dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah.
- b. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
- c. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional.
- d. Dana penelitian yang semakin meningkat.
- e. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian sehingga bisa menjadi tesis dan disertasi yang berkualitas.

2. Tahap II pada tahun 2021-2025

- a. Perolehan HaKI yang mengalami kenaikan.
- b. Munculnya dosen yang menjadi pakar pada bidang tertentu.
- c. Buku ajar yang bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar.

- d. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional, nasional terakreditasi DIKTI, internasional dan internasional bereputasi (Scopus, Thomson dan DOAJ).
- e. Meningkatnya dana yang diperoleh baik dari STIE Trisakti, Perusahaan dan DRPM DIKTI.
- f. Meningkatnya mitra penelitian dari industri dan lembaga.
- g. Meningkatnya hasil penelitian yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan di masyarakat.

Formulasi Strategi Pengembangan Strategi Pengembangan yang akan dijalankan didasarkan pada butir-butir yang dikelompokkan pada komponen proses, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Sistem Reward Pemberian penghargaan ini dijadikan strategi utama untuk menggairahkan dan membentuk budaya penelitian yang baik dan bermutu. Sistem ini diwujudkan dalam beberapa bentuk antara lain:
 - a. Pemberian stimulus dana berdasarkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Pemberian insentif atas karya ilmiah bermutu yang dipublikasikan dalam Jurnal nasional, nasional terakreditasi DIKTI, internasional dan internasional bereputasi (Scopus, Thomson, dll) dan Buku Teks.
 - c. Pemilihan dan pemberian penghargaan untuk Peneliti Terbaik dan Penulis Paling Produktif.
2. Pelatihan dan Seminar Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan peneliti, strategi yang akan ditempuh antara lain adalah mengirim peserta dan menyelenggarakan berbagai pelatihan, misalnya: pelatihan metodologi dan penulisan proposal penelitian, penulisan karya ilmiah untuk jurnal nasional dan internasional, penulisan buku ajar dan pengelola jurnal. Secara rutin, seminar-seminar dan diskusi ilmiah juga akan diselenggarakan sebagai ajang untuk berbagi informasi dan hasil penelitian, kiatkiat dan peluang, latihan presentasi, sarana diskusi dan kolaborasi.
3. Dukungan Dana, Fasilitas dan Administrasi PPS UNY memberikan dukungan dana penelitian sesuai dengan RKPT yang diupayakan meningkat setiap tahunnya. Adapun bentuk dukungan yang disiapkan antara lain:
 - a. Dana untuk mengikuti konferensi untuk mempresentasikan karya ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri.

- b. Dana untuk mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi (Scopus, Thomson dll).
- c. Dukungan perbaikan karya tulis yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional bereputasi (Scopus, Thomson, dll).
- d. Penyediaan fasilitas jurnal yang dapat diakses melalui Proquest.com, proceeding konferensi nasional dan internasional.
- e. Dukungan administrasi penelitian dan pengurusan HaKI.

B. PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

Kebijakan mutu merupakan acuan dalam menjalankan strategi yang di rumuskan. Sistem penjaminan mutu dan sasaran mutu disusun dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan kegiatan penelitian. Standar nasional penelitian yang dikembangkan oleh Ristek Dikti disajikan dalam gambar berikut. Standar penjaminan mutu penelitian terdiri dari delapan standar yaitu 1) standar hasil penelitian, 2) standar isi penelitian, 3) standar proses penelitian, 4) standar penelitian penelitian, 5) standar peneliti, 6) standar sarana dan prasarana penelitian, 7) standar pengelolaan penelitian, dan 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



1. Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan dalam hal capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Secara rinci untuk kriteria pencapaian standar disajikan dalam tabel berikut:

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian.
2	Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: <ul style="list-style-type: none"> • minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian • Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per prodi dalam setiap 3 tahun. • Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per prodi dalam setiap 3 tahun.
3	Mempunyai nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per prodi dalam setiap 3 tahun.

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. • Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per program studi per 3 tahun. • Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per prodi per 3 tahun.
5	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi minimal 10% • Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi minimal 50%
6	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun

2. Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Kriteria untuk pencapaian standar isi penelitian disajikan dalam tabel berikut:

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat per prodi.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat per prodi masing-masing, minimal 80%.
2	Penelitian yang bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal

3. Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tesis atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

Kriteria pencapaian standar proses penelitian disajikan dalam tabel berikut:

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di departemen/pusat.
2	Pelaksanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> • Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i>.

3	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
---	------------------------------------	---

4. Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tesis dan disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Kriteria pencapaian standar pada penilaian penelitian disajikan dalam tabel berikut:

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
2	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal.

		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.
		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3	Evaluasi dan perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada checklist penilaian kesesuaian • Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

5. Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: 1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil penelitian.

Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan Pascasarjana UNY.

Kriteria pencapaian standar peneliti disajikan dalam tabel berikut:

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	Capaian peneliti	<p>Jumlah penghargaan yang diperoleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 1 penghargaan berskala nasional per departemen/pusat per 2 tahun • Minimal 1 penghargaan berskala internasional per departemen/pusat per 3 tahun
4	Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 4% (terhadap jumlah dosen di departemen)

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kriteria pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian disajikan dalam tabel berikut.

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).

7. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Kriteria pencapaian standar pengelolaan penelitian disajikan dalam tabel berikut:

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Pengelolaan penelitian	<ul style="list-style-type: none">• Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset Pasca Sarjana UNY.
		<ul style="list-style-type: none">• Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
		<ul style="list-style-type: none">• Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) pengendalian penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) pelaporan hasil penelitian; dan 6) diseminasi hasil penelitian.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi dan direktur program pascasarjana UNY.

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1		
2		

C. SISTEM INFORMASI PENELITIAN

Untuk menjamin tersedianya informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian dan PPM yang dilaksanakan dan dikelola oleh PPs-UNY, maka diperlukan basis data. Untuk itu PPs-UNY perlu mengembangkan basis data secara elektronik. Basis data penelitian dan PPM juga dimaksudkan untuk menjamin kesimbangan program penelitian setiap program studi sesuai dengan arah pengembangan masing-masing program studi. Masing-masing prodi harus merancang arah dan tahapan program penelitian dan ppm sesuai dengan visi dan misi masing-masing yang ditunjukkan dengan Petajalan atau Road Map. Tersedianya peta jalan penelitian dan ppm juga akan menjamin terjadinya duplikasi dan pengulangan judul dan permasalahan penelitian dan ppm yang dilakukan prodi.

BAB V

RAMBU-RAMBU UMUM PENYUSUNAN TEMA/TOPIK PENELITIAN PRODI DI PPs UNY

A. KEBIJAKAN PPS

PPs UNY menetapkan bidang pendidikan sebagai unggulan dalam melakukan penelitian. Kelima bidang pendidikan menjadi acuan dalam penelitian bidang pendidikan bagi semua program studi maupaun PPs sendiri.

Lima bidang unggulan penelitian bidang pendidikan PPs UNY, yaitu sebagai berikut.

1. Pendidikan Berkarakter dan berdaya saing. PPs mengembangkan desain pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama, budaya nasional yang berdaya saing global, dan perdamaian.
2. Pendidikan Berkeadilan. PPs mengembangkan sistem dan model pendidikan yang mampu memberikan kesempatan kepada semua warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang emansipatoris dan partisipatoris.
3. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu PPs UNY juga harus mengembangkan model pendidikan yang menjamin kelestarian lingkungan hayati, fisik, sosial, dan budaya.
4. Kearifan lokal, lokalitas, dan *indegenous knowledge*. PPs juga perlu mengkonservasi, mangaktualisasi, dan mengembangkan modal budaya, sosial, dan alam nusantara untuk menghadapi tantangan global dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
5. *Global village*, masyarakat informational dan komunikasional, serta *borderless community*. PPs UNY perlu mengembangkan pendidikan dalam menghadapi tantangan era teknologi informasi dan komunikasi untuk mampu beradaptasi dengan komunitas lokal, regional, dan global tanpa sekat.

B. PERAN PRODI

1. Pengembangan bidang keilmuan prodi

- Melalui penelitian: penelitian prodi dan penelitian mahasiswa.
- Prodi menetapkan satu atau dua dari tema unggulan penelitian dari PPs dengan menyesuaikan dengan bidang keilmuan dan kesiapan SDM, serta IPTEKS dari Prodi.
- Melakukan kajian keilmuan melalui forum ilmiah seperti seminar, workshop, kuliah umum dari nara sumber yang sengaja diundang untuk berbicara tentang yang diperlukan untuk pengembangan wawasan dosen dan mahasiswa.
- Melakukan serial diskusi mendalam untuk memahami, mengembangkan dan menemukan substansi keilmuan sesuai dengan Prodi masing-masing.

2. Menghasilkan Magister dan atau Doktor

Magister lulusan PPs-UNY harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) level 8. Oleh karena itu Tugas Akhir (TA) level 8 untuk program magister harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. TA berupa hasil penelitian magister harus menunjukkan karya inovatif dan teruji.
- b. Mendapatkan pengakuan nasional melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- c. Menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
- d. Hasil penelitian harus bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan bagi masyarakat.

Kriteria T.A. level 9, untuk program doktor

- a. T A berupa hasil penelitian doktor harus menunjukkan karya kreatif, original, kebaruan, dan teruji.
- b. Hasil penelitian TA mahasiswa doktor harus mendapatkan pengakuan internasional dengan dibuktikan dengan publikasi ke jurnal internasional terindeks scopus dan bereputasi.
- c. Penelitian menggunakan pendekatan multi, inter, dan transdisiplin.
- d. Hasil penelitian harus bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan kemasyarakatan umat manusia.

C. SUBSTANSI KEILMUAN DAN PERMASALAHAN

Sebelum seseorang melakukan penelitian, maka ia harus menguasai bidang yang diteliti. Mustahil seseorang dapat melakukan penelitian dengan baik bila kurang menguasai dan memahami bidang yang diteliti. Untuk dapat melakukan penelitian seseorang tidak cukup menguasai metode penelitian dan kurang menguasai bidang yang diteliti. Hal ini karena fenomena atau gejala dan permasalahan itu ada pada bidang ilmu yang diteliti. Metode hanya merupakan suatu alat yang hanya akan dapat dipakai dengan tepat bila seseorang tersebut mengetahui dan memahami bidang tersebut.

Pada umumnya ketika menyusun proposal TA mahasiswa selalu mengalami kesulitan pada tahap identifikasi permasalahan. Diduga hal ini disebabkan mahasiswa tidak terbiasa melakukan penelitian berangkat dari permasalahan yang riil ada, tetapi kebiasaan yang menirukan dengan tanpa mempejari dari realitasnya. Mereka terjebak pada stereotipe pada TA yang sudah ada di PPs UNY. Misalnya untuk S-3 stereotipnya penelitian dengan prosedur Research & Development lalu mereka mengikuti penelitian R & D. Apapun permasalahannya kemudian selalu terarah pada R & D. Hal ini bisa menyebabkan tidak semua permasalahan pada bidang keilmuan prodi mendapatkan solusi melalui penelitian tesis maupun disertasi. Selain itu juga kurang mendukung upaya PPs dan prodi untuk pengembangan bidang keilmuan dan dari prodi. Sehingga perlu ada langkah untuk mendorong mahasiswa mengidentifikasi permasalahan riil yang ada di lapangan.

Permasalahan pendidikan pada umumnya ada di bawah permukaan. Yang muncul pada umumnya merupakan gejala atau fenomena sedangkan permasalahan itu ada di balik fenomena. Kadang-

kadang permasalahan itu ada jauh di dasar permasalahan-permasalahan yang disebut akar permasalahan. Yang dapat dikenali dengan pancaindera adalah gejala atau fenomena. Hal ini diperkirakan karena mahasiswa terbiasa bahwa yang kurang, yang jelek itu merupakan permasalahan, meskipun kadang-kadang yang dikatakan itu bisa dikategorikan gejala atau fenomena. Misalnya nilai Ujian Nasional Rendah itu bukan permasalahan tetapi gejala. Permasalahannya mungkin ada pada guru, diri siswa, lingkungan sosial, lingkungan fisik (sarana dan prasarana) dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dibiasakan mengenali gejala dan sekaligus permasalahannya.

Permasalahan biasanya didefinisikan dengan kesenjangan antara yang aktual dengan yang ideal. Yang aktual adalah realitas yang ada saat ini, sedangkan yang ideal adalah kondisi yang seharusnya menurut teori, konsep, atau kriteria standar. Definisi ini tidak memadai untuk semua jenis penelitian, apalagi bila dipakai penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif naturalistik. Karena penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap misteri yang ada di masyarakat dan mencoba untuk mendeskripsikan, mengkopsikan, merumuskan, dan memodelkannya. Kemudian hasil penelitian itu harus diuji kepada konteks masyarakat, sosial budaya lain apakah *transferable* atau tidak. Dengan kata lain permasalahan pada penelitian kualitatif adalah pengungkapan misteri pada konteks itu belum pernah dilakukan.

Sebagai contoh, keraguan terhadap beberapa metode pembelajaran yang mirip dan hampir sama, misalnya berbagai macam belajar kooperatif terkait keefektifannya terhadap pembentukan kompetensi peserta didik juga merupakan permasalahan yang lebih pada permasalahan belum diketahuinya informasi tentang kesfektifan

suatu metode pembelajaran dalam pembentukan kompetensi tertentu dari peserta didik. Kalau permasalahan ini yang ada maka perlu dilakukan penelitian ekperimen.

D. PENGEMBANGAN TEMA DAN TOPIK PENELITIAN

1. Penentuan tema-tema unggulan setelah prodi menetapkan bidang unggulan.
2. Tema tema untuk penelitian tesis dan atau disertasi.

Bagi prodi yang sudah memiliki tema tema dan bahkan research group tinggal menyesuaikan.

E. FORMAT PENGAJUAN JUDUL PENELITIAN TESIS DAN DISERTASI

Gejala/ Fenomena	Idenfikasi permasalahan	Rumusan Permasalahan	Judul Penelitian	Metode Penelitian